

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Abidin, SZ (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Andersen, J (1975). *Public Policy Making*. London : Thomas Nelson and Sons Ltd.
- Bobo, J (2003). *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta : PT.Pustaka Cidesindo.
- Budiarso, Solikin dan Ramadhana (2006). *Teori Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Departemen Keuangan RI.
- Creswell, J.W (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* California: Sage Publicatons Inc.
- Danim, S (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Samodra Wibawa dkk, Penerjemah). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hogwood, B.W. and Gunn, L.A (1984). *Policy Analysis for The Real World*. New York : Oxford University Press.
- Howlett, M and Ramesh, M (2003). *Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems*. Second Edition. New York : Oxford University Press.
- Ikhsan, M dan Salomo, RV (2002). *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta : STIE-LAN Press.
- Irawan, P (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Irawan (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta : UI Press.
- Jones, C (1991). *Pengantar Kebijakan Publik* (Ricky Ismanto, Penerjemah). Jakarta : Rajawali.

- Kadarisman, H (2007). *Memperkuat Ekonomi Nasional Berbasis Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : Kelompok Independen Indonesia.
- Lester, J.P. and Stewart, Jr., J (2000). *Public Policy. An Evaluationary Approach*. Second Edition. Stamford : Wadsworth.
- Moekijat (1995). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Murwanto, Budiarmo dan Ramadhana (2006). *Audit Sektor Publik*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Departemen Keuangan RI.
- Nazier, DM (2004). *Teknologi Informasi untuk Menunjang Penerapan Kebijakan Fiskal*. Dalam Subiyantoro, H dan Riphath, S (Editor). *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasinya*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Nordiawan, D et.al. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Nugroho, R.D. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R.D (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Osborne dan Gaebler (2005). *Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) : Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit PPM.
- Parsons, Wayne (1995). *Public Policy, An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. UK : Edward Elgar Publishing Limited.
- Prasetyantono, AT (1997). *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sabeni, A dan Ghozali, I (1995). *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : BPFE.
- Siagian, SP (2001). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharto, E (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Syafiie, Tandjung dan Modeong (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syamsi, I (1994). Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara. Jakarta : Rineka Cipta.
- Todaro dan Smith (2006). Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Weimer, D.L and Vining, A.R (1992). *Policy Analysis, Concept and Practice*. New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Yunus, M (2008). Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

## II. SERIAL

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 (2008). Akuntansi Dana Bergulir. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).
- Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Melalui KSP/USP Koperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah) (2006). Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM No.1 Tahun I-2006. Jakarta.
- Glover, D (1994). *Policy Researchers and Policymakers : Never The Twain Shall Meet?*. Journal of Philippine Development Number 38 Vo XXI Nos 1 & 2 First & Second Semesters.
- Hadad, I (2001). Menjamin Arus Dana, Mengekalkan Misi Organisasi. Ragam Warta Kehati Edisi Januari – Februari 2001. Jakarta.
- Laking, R (2005). *Agencies : Their Benefits and Risks. The OECD Journal on Budgeting*. Volume 4 Number 4.
- Sukrasno (2006). Badan Layanan Umum Dalam Tinjauan Filosofis dan Sosiologis serta Ekspektasi di Masa Depan. Majalah warta Anggaran Edisi 4 Tahun 2006. Jakarta.

### III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Arsanto, W (2007). Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat. Artikel pada [www.karmonev.menpan.go.id](http://www.karmonev.menpan.go.id) (Diakses pada 12 Juni 2008).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (2006). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2006. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) (Diakses pada 20 Juni 2008).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (2004). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2004 [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) (Diakses pada 20 Juni 2008).
- Cell, M.A (1992). *Economic Development Administration Revolving Loan Funds. Economic Development Review. ABI/INFORM Global* (Diakses pada 15 Desember 2008).
- Franklin, A.L and Dauglass, J.W (2003). *Revolving Funds as Budgeting Tools : An Examination of Oklahoma State Agencies. State and Local Government Review Vol 35 No 2 (Spring 2003)* (Diakses pada 15 Desember 2008).
- Kalapos, G and Jessup, P (2005). *Revolving Funds. Municipalities Can Turn Their Energy Cost Into Gold. Alternatives Journal. Jan/Feb 2005. 31, 1. Academic Research Library.* Artikel pada <http://www.city.toronto.on.ca/taf/>. (Diakses pada 20 Mei 2008).
- Khan, A and Hildreth, W.B (2002) *Budget Theory in The Public Sector*. Quorum Books. London
- Madden, D.R (1989). *Local Revolving Loan Programs : Some Winsconsin Experiences. Economic Development Review. ABI/INFORM Global* (Diakses pada 15 Desember 2008).
- Panggabean, Riana (2005). Efektivitas Program Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM. (Diakses pada 29 Januari 2009).
- Rahayu, SK. et.al. (2001). Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim; Kab.Kapuas, Kalteng; Kab.Barito Kuala, Kalsel. Artikel pada <http://www.smeru.or.id> (Diakses pada 12 Juni 2008).
- Retnadi, D (2007). Akselerasi Pembiayaan UMKM (Diakses pada 12 Juni 2008).

Revitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2007. <http://www.depkop.go.id> (Diakses pada 12 Juni 2008).

Ringkasan Eksekutif Kajian Efektivitas Bantuan Dana Bergulir Kepada Masyarakat di Kota Bandung (2003) Kantor Litbang dengan LPM-UPI. <http://www.bandung.go.id> (diakses pada 12 Juni 2008).

Saasa, Oliver S (1985). *Public Policy-Making in Developing Countries : The Utility of Contemporary Decision-Making Models. Public Administration and Development*. Vol 5 (4). Pp.309-21 (Diakses pada 20 Januari 2009).

Schiavo-Campo, S and Tommasi, D (1999) : *Managing Government Expenditure*; Asian Development Bank. <http://www.adb.org> (Diakses pada 12 Juni 2008).

Supriyanto, Joko dan Suparjo (2006). Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat. Makalah pada Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Diakses pada 20 Mei 2008).

*The Budget System and Concept. Authenticated US.Government Information (n.d).*

Whicker, ML and Mo, C (2002). *Budget Theory In The Public Sector The Impact of Agency Mission on Agency Budget Strategy: A Deductive Theory* (Khan, A and Hildreth, WB, Editor) *Budget Theory In The Public Sector*. Quorum Books. London.

#### **IV. TESIS**

Kotot, N (1995). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di DKI Jakarta. Thesis. Jakarta : FISIP UI.

#### **V. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.02/2006 jo. PMK No.119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan No.8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.02/2006 jo. PMK No.109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 jo No.73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.05/2008 jo. PMK No.221/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan LPDB-KUMKM pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.